

BAB 6

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PRAKTIK DUALISME PILIHAN POLITIK TAREKAT CUKIR

Meskipun dalam berelasi dengan pihak lain, Tarekat Cukir memerlukan habitus, modal dan arena, tetapi dalam praktiknya sebenarnya Tarekat Cukir tidak benar-benar bebas melakukan praksis sosial berupa dualisme pilihan politik. Praksis tersebut seolah-olah merupakan pilihan pihak Tarekat Cukir sendiri. Padahal jika ditelusuri, sebenarnya praktik tersebut karena adanya pengaruh dari luar Tarekat Cukir. Dengan kata lain, praktik tersebut merupakan akibat dari dominasi pihak dunia luar, yaitu pandangan penguasa yang dianggap sebagai pandangan seluruh masyarakat. Masyarakat tidak lagi memiliki sikap kritis pada pandangan penguasa. Artinya, karena adanya pandangan orang yang punya kuasa/ otoritas yang dianggap benar oleh seluruh masyarakat.

Setidaknya ada hal yang mempengaruhi Tarekat Cukir melakukan praksis sosial tersebut. Setidaknya, ada dua hal yang mempengaruhi Tarekat Cukir melakukan praktik dualisme pilihan politik pada Pilbup 2018. Oleh karena hal ini tentang dualisme, maka untuk menjelaskannya peneliti membaginya ke dalam dua bagian. *Pertama*, faktor yang mempengaruhi Tarekat Cukir melakukan prakti mendukung dan memilih PPP sebagai wadah penyaluran aspirasi politiknya, tetapi di saat yang sama menolak kandidat yang merupakan kader usungan PPP. *Kedua*, faktor yang mempengaruhi Tarekat Cukir melakukan praktik mengawal dan mendukung Bupati yang merupakan kader usungan Golkar, sebagai kandidat *Incumbent*.

6.1. Faktor yang Mempengaruhi Tarekat Cukir Memilih PPP dan Menolak Kandidat Usungan PPP

6.1.1. Keyakinan Pentingnya Mempertahankan Ikatan Spiritual/ Ruhani Murid - Mursyid

Kaum tarekat cenderung berpegang pada kebenaran bahwa murid harus patuh kepada guru mursyidnya. Di lapangan ditemukan adanya kecenderungan jama'ah Tarekat Cukir meyakini kebenaran bahwa murid harus patuh kepada guru mursyidnya dalam urusan

tarekat dan urusan politik. Hal ini tampak pada ungkapan Kiai Maftuh, yang mengutip tulisan dalam kitab *manâqib: wa al-mukhâlafatu sabab al-firâq*. Kalimat ini oleh Kiai Maftuh dimaknai keharusan murid taat dan patuh kepada guru mursyid dalam hal urusan agama dan politik (Kiai Maftuh, 11-07-2018). Dampak dari makna kalimat ini adalah murid yang menyelisihi guru mursyid bisa menjadi penyebab terputusnya hubungan ruhani antara murid dengan guru mursyid tersebut. Temuan ini cenderung memperkuat temuan Jamil (2005) yang menjelaskan tentang pandangan Kiai Makki, yakni salah satu toko pendiri Tarekat Cukir yang meyakini kebenaran tentang mursyid bisa memaksa murid dalam urusan pilihan politik.

Adapun kasus, pengurus/ jama'ah Tarekat Cukir yang tidak mengikuti Kiai Maftuh dalam urusan politik, hal itu karena dari pihak mursyid sendiri telah menjelaskan perbedaan istilah mursyid dan guru mursyid. Dampak dari istilah ini terhadap jama'ah Tarekat Cukir adalah pengurus atau jama'ah yang berbaiat di bawah Kiai Makki Ma'shoem dan Kiai Maftuh, harus mengikuti pilihan politik Kiai Maftuh, meskipun Kiai Maftuh sendiri tidak pernah mewajibkan secara literal, karena jama'ah dipandang sudah memahami reproduksi makna ajaran. Sebaliknya, jama'ah yang tidak berbaiat di bawah keduanya, tidak harus memiliki pilihan politik yang sama dengan keduanya. Kiai Mad yang cenderung tidak terlalu fokus pada urusan partai politik, tetapi diiconkan sebagai pengurus PPP (Gus JS, 07-07-2018; Kiai Maftuh, 11-07-2018), maka jama'ah yang berbaiat di bawahnya juga tetap menjadi pendukung PPP, di samping juga merupakan bentuk "*tabarrukan*" terhadap para pendiri tarekat Cukir yang memilih PPP.

Selain meyakini kebenaran makna reproduksi dari *manâqib* sebagaimana di atas, Tarekat Cukir juga meyakini kebenaran makna tata aturan yang mengatur hubungan murid-mursyid dalam buku pegangan Tarekat *Qadiriyah wa Naqsyabandiyah*, yang maknanya direproduksi pada level perwakilan/ khalifah (Kiai Kasmuri, 14-07-2018). Detailitas tata aturan tersebut telah peneliti paparkan pada bab 4. Tidak ada ruang bagi jama'ah untuk mengkritisi isi dari tata aturan tersebut. Hal ini karena, jam'iyah tarekat adalah milik

mursyid. Jadi, jika ada orang yang ingin menjadi murid, berarti ia harus siap meneriama apa yang ada di dalamnya.

Hubungan murid-guru mursyid mencakup dimensi lahir dan dimensi batin. Hal ini bisa ditemukan pada keterangan Kiai Maftuh (11-07-2018) sebagai berikut:

Kalo Mbah Adlan sampai sekarang, gak ada yang mewajibkan.

Cuma bahasane Mbah Adlan, lek aku nduk kene, lek awakmu pengen tetep kepetuk aku yo...”. Terjemah: “...Kalau (zaman) Mbah Adlan sampai sekarang, tidak ada (mursyid) yang mewajibkan. Hanya saja bahasa Mbah Adlan, kalau aku di sini (PPP), jika kalian masih tetap ingin bertemu denganku...”

Hal tersebut juga diperkuat, bahwa pasca Reformasi, partai yang berasaskan Islam tinggal dua, yaitu PPP dan PKS. Namun dalam hal ini, Kiai Maftuh tetap memilih PPP. Karena memilih PPP terkait erat dengan amaliah tarekat, yaitu *murâqabah* (mengingat guru mursyid secara sekilas, dan kemudian terhubung mengingat Allah SWT). PKS sendiri, pengurusnya tidak ada yang terhubung secara spiritual dengan Tarekat Cukir. Kiai Maftuh (11-07-2108) mengatakan:

“...Iya, yang (partai) Islam dua; PPP dengan PKS. Karena itu nanti hubungannya dengan *murâqabah*...”.

Meskipun menurutnya, secara akidah PPP dan PKS sama-sama dari kalangan Ahlussunannah.

Dari uraian di atas, bisa dipahami bahwa pengaruh guru mursyid terhadap murid tidak hanya terbatas pada ranah spiritual saja, tetapi juga pada ranah sosial politik. Temuan ini memperkuat temuan Musthofa (2017) yang menyatakan bahwa murid tidak hanya melakukan hubungan batin dengan mursyid dalam perjalanan spiritual yang bersifat mistis dan ritual ketarekatan. Perilaku lahir murid juga terhubung dengan mursyid dalam berbagai sendi kehidupan. Menurutnya, predikat *murabbî al-rûh* (pendidik ruhani) bagi mursyid tidaklah misterius dan bersifat abstrak. Namun, ia terapkan pada gerak perilaku sosial mursyid dan mempengaruhi laku spiritual murid dalam bertarekat. Hanya saja, temuan Musthofa tidak secara tegas spesifik menyebutkan tentang keharusan murid mengikuti mursyid dalam urusan politik, karena selain bukan fokus kajiannya juga karena Tarekat Syadzilyah

Tulungagung memang dikenal tidak pernah terlibat aktif dalam politik praktis.

6.1.2. Faktor Persamaan Kultural -Ideologis

Persamaan kultural merupakan faktor pendukung yang mempengaruhi Tarekat Cukir mendukung dan memilih PPP. Temuan ini terungkap pada pernyataan Kiai Maftuh (11-07-2018) saat peneliti tanya tentang dukugannya terhadap PPP:

“...Itu dari kulturalnya saja mas...”

Artinya, memilihnya Tarekat Cukir terhadap PPP juga dipengaruhi oleh faktor tradisi lingkungan yang ada yang sudah terbangun oleh generasi sebelumnya, sehingga ketika ada keinginan untuk pindah dukungan ke lain partai politik dirasakannya sebagai hal yang janggal. Pandangan Kiai Maftuh tersebut juga diperkuat oleh pandangan Gus JS (07-07-2018), bahwa para pengurus PPP sendiri didominasi oleh orang-orang yang secara ideologis-kultural sama dengan NU, terdapat sejumlah orang-orang dari Muhammadiyah dan LDII, namun menyusut. Terdapat ikatan kuat antara Tarekat Cukir dan PPP, karena sama-sama memiliki basis massa utama, yaitu masyarakat NU.

Orang-orang Tarekat Cukir sendiri identik dengan orang-orang NU. Kiai Maftuh (11-07-2018) sendiri pernah mengatakan bahwa tidak semua orang NU itu bertarekat, tetapi pengikut tarekat bisa dipastikan berhaluan NU. Amaliah orang-orang NU juga merupakan amaliah orang-orang tarekat. Kesaamaan tradisi ini turut memperkuat pilihan politik Tarekat Cukir terhadap PPP. Apalagi keberadaan orang-orang NU yang menjadi mayoritas di kepengurusan PPP Jombang. Bahkan beberapa di antaranya telah berbaiat di bawah naungan Tarekat Cukir, dan bisa dipastikan orang tersebut adalah orang yang bertradisi NU. Keduanya merupakan kelompok yang mengikuti paham Ahlussunnah wal Jama'ah; yaitu salah satu dari kelompok muslim yang menjadi mayoritas, mengikuti apa yang datang dari Nabi, dan menerima apa yang telah menjadi kesepakatan (ijma') para sahabat. Secara akidah mengikuti pemikiran al-Asy'ariyah – al-Maturudiyah, secara fiqhnya mengikuti madzhab empat; Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Hanbaliyah, sementara tasawufnya mengikuti apa yang telah

dikembangkan oleh al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Hanya saja, perlu dicatat bahwa dalam praktik kesehariannya orang-orang tarekat maupun PPP, fiqh yang diamalkan cenderung lebih mengarah ke salah satu madzhab, yaitu Syafi'iyah.

Pilihan politik berdasarkan semangat persamaan kultur, setidaknya ditemukan dalam kasus masa lalu, yaitu kasus NU yang berupaya memengkan PPP di Gresik pada tahun 1977-1982 (Al-Islah, 2014). Demikian juga yang terjadi di Jombang saat itu, beberapa mursyid tarekat terlibat menjadi juru kampanye untuk kemenangan PPP (Syam, 2005).

Meskipun sama-sama partai Islam, dan sama-sama dari kalangan Ahlussunnah wal Jama'ah, PPP sendiri jika dibandingkan dengan PKS, secara kultural terdapat perbedaan tradisi. Itulah mengapa, Tarekat Cukir cenderung memilih PPP.

6.1.3. Keinginan Agar Ajaran Tarekat Menjadi Filter bagi Perilaku Politik PPP (Dakwah)

Pihak Tarekat Cukir yang selalu mendukung PPP, ternyata memiliki agenda tersendiri, yaitu menargetkan ajaran tarekat menjadi alat kontrol bagi perilaku politik orang-orang PPP. Faktor ini tidak bisa dipisahkan dari kedua faktor di atas, karena berkait kelindan satu sama lainnya. Kiai Maftuh (11-07-2018) mengatakan: “...Kalau bisa orang toriqoh mewarnai partai, bukan partai mewarnai toriqoh, jangan sampai. Tujuannya biar orang-orang partai itu punya filter. Jadi karakternya supaya *mboten kebacut* (tidak keablasan)”.

Tarekat Cukir berupaya mendominasi PPP dengan menjadikan ajarannya sebagai filter bagi PPP. Tampaknya hal ini menjadi beban moral bagi Tarekat Cukir generasi sekarang, karena ini merupakan tinggalan generasi sebelumnya. Meskipun sebenarnya antara Tarekat Cukir dan PPP merupakan dua bagian yang terpisah, dan secara koordinasi tidak memiliki hubungan. Kiai Maftuh menjelaskan:

“Kalau toriqoh itu tidak ada hubungannya dengan partai, sampai sekarang tidak ada. Cuma ketepatan mulai Mbah Kiai Adlan sampai sekarang yang mendominasi toriqoh di Cukir itu

orang PPP semua. Nggak ada hubungan dengan partai, dan dari kamipun memberi kebebasan. Cuma jangan sampai toriqohnya dibawa ke partai. Partainya saja yang dibawa ke toriqoh. Jadi, partainya dibawa ke toriqoh, jangan sampai toriqohnya dibawa ke partai. Nah, kepingin kami kalau partainya mau dibawa ke toriqoh biar ada filternya. Saya sendiri orang politisi mas”.

Kebebasan yang diberikan Tarekat Cukir kepada jama'ahnya, tampak pada adanya personil pengurus Tarekat yang bukan dari kalangan PPP, bahkan dari kalangan partai yang didominasi kaum abangan. Dakwah Tarekat Cukir tidak terbatas pada PPP saja, tetapi juga pada kelompok lainnya secara lebih luas. Kiai Maftuh (11-07-2018) mengatakan:

“...pengurus kami yang ada di Lamongan itu ketua PDI”.

“...Iya, yang baiat saya. Tapi dia jadi Ketua Cabang PDI Lamongan. Yang di Mojokerto itu PKB. Saya juga berharap jangan sampai kalau sudah kumpul tentang masalah toriqoh jangan sekali-kali membahas partai”.

Dukungan dan pilihan terhadap PPP sebagai misi dakwah, diperkuat dengan kenyataan bahwa dukungan Tarekat Cukir terhadap PPP tidak dibarengi dengan berbagai bantuan dari pihak PPP. Kiai Maftuh (11-07-2018) mengatakan bahwa secara kontribusi organisasi PPP memang tidak pernah memberi bantuan, tetapi walaupun ada bantuan yang diberikan melalui perorangan. Hal ini diperkuat dengan keterangan Hafidh Ma'shoem (09-02-2018) bahwa organisasi PPP memang tidak pernah memberikan bantuan materi kepada kelompok Tarekat Cukir. Jadi, pilihan Tarekat Cukir, memang bukan karena materi.

Mendukung atau bergabung dengan suatu partai tertentu sebagai wujud menjalan misi dakwah juga ditemukan dalam beberapa penelitian. Tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah* di Rejoso Jombang bergabung ke Golkar di masa Orde Baru karena ada salah satu misinya, yaitu dakwah. Hal ini ditempuh untuk memudahkan menyebarkan ajaran agama di tengah maraknya pencekalan dari pihak pemerintah yang cenderung otoriter (Sujuthi, 2001). Kasus Tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah* di Lombok

Tengah yang terlibat aktif dalam politik praktis menjadi faktor yang mengakibatkan adanya polarisasi (Nasir, 2006: 111-112). Alasan dominan yang mengemuka di antaranya adalah agar bisa ikut berperan aktif dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Perjuangan politik dan perolehan akses kekuasaan sebagai salah satu bentuk dakwah Islam yang harus diperjuangkan. Bagi mereka dakwah Islam melalaui perjuangan politik adalah dengan bergabung dengan Golkar, dan tidak berubah selama masih ada. Mu'min (2014) juga menemukan bahwa bergabungnya Kiai Shiddiq, mursyid TQN di Kudus ke Golkar, salah satu pertimbangannya adalah untuk dakwah Islam. Secara umum, kasus-kasus bergabungnya kelompok tarekat pada masa Orde Baru atas pertimbangan dakwah di tengah tekanan pemerintah yang cenderung represif. Barangkali, selain itu Tarekat yang dipimpin Kiai Shiddiq ini secara genealogi merujuk pada Tarekat Rejoso yang juga berafiliasi dengan Golkar. Kiai Shiddiq berbaiat kepada Mursyid Tarekat Rejoso Peterongan Jombang, yaitu Kyai Haji Tamim Romli (Mu'min, 2016).

Temuan tentang adanya pertimbangan dakwah dalam kasus dukungan kelompok kepada partai politik dalam penelitian ini cenderung memperkuat temuan-temuan sebelumnya. Hanya saja, secara umum, temuan-temuan sebelumnya dukungan politik dibarengi dengan bantuan-bantuan berupa materi dan lainnya. Sementara dukungan Tarekat Cukir terhadap PPP tidak diimbangi dengan bantuan materi atau lainnya dari pihak PPP. Tetapi ada hal yang utama dari itu semua, yaitu praktik memilih politik bagi kelompok-kelompok tarekat tersebut, dipengaruhi oleh misi karena sebuah pandangan tentang pentingnya dakwah Islam.

6.1.4. Adanya Ikatan Historis dan Pengaruh Politik

Relasi antara Tarekat Cukir dan PPP telah terbangun sedemikian kuat. Hal itu, karena dalam proses berdirinya tidak lepas dari tokoh-tokoh kharismatik yang aktif di PPP dan di saat yang sama aktif di Tarekat Cukir. Kiai Adlan Aly adalah mursyid pertama yang membai'at di Tarekat Cukir. Keulamaannya tidak diragukan lagi. Kiai Adlan merupakan ulama Tarekat dan politisi PPP sekaligus. Dalam banyak pengajian yang disampaikannya, ia tidak ragu-ragu menganjurkan jamaah untuk memilih PPP, meskipun saat

itu situasi dan kondisi di bawah tekanan pemerintah begitu hebat. Sampai pada suatu ketika pihak Koramil Diwek ingin menegurnya, tetapi mereka tidak berani karena kewibawaannya (Syam, 2004). Kiai Adlan, oleh kaum tarekat dipandang sebagai wali, sehingga meskipun telah wafat, ia diyakini masih hidup dan selalu mengawal jalannya rutinitas ketarekatan. Kiai Mad (30-06-2018) pernah menceritakan kepada peneliti bahwa suatu ketika ia menjalankan tugas membaiat para jama'ah. Di tengah prosesi itu, Kiai Mad melihat Kiai Adlan Aly benar-benar menampakkan dirinya di arena baiatan. Kiai Mad sendiri secara sadar sepenuhnya bahwa Kiai Adlan telah wafat. Tetapi dengan penglihatan hari itu, Kiai Mad tidak bisa membohongi kesaksiannya sendiri. Kiai Mad sendiri tidak pernah membayangkan sebelumnya tentang hal ini. Kaum tarekat bahwa orang hidup bisa melihat dan bertemu orang yang sudah mati, meskipun jarak antara yang hidup dan yang mati terpaut sekian banyak tahun. Tentu saja, pengalaman seperti ini hanya dialami oleh orang-orang tertentu.

Apakah kasus yang dialami Kiai Mad, serupa dengan pengalaman Muhammad SAW yang diyakini oleh kaum Sunni, bisa bertemu dengan para nabi yang sudah wafat secara ruh dan jasad dalam kasus Isra'-Mi'raj? (Ibnu Katsrir, 1999: 43-44). Barangkali demikian juga pada kasus para wali, termasuk di antaranya Kiai Adlan Aly. Orang yang hidup dan mampu melihat wali yang sudah wafat diyakini sebagai orang pilihan dan anugerah dari Allah SWT.

Cerita tentang kesaksian Kiai Mad tersebut tampaknya juga pernah didengar oleh sebagian jama'ah, dan membenarkan cerita tersebut. Kiai Adlan yang dipandang memiliki kekeramatan itulah yang dijadikan pedoman dan dipegang pesan-pesannya; baik ketika ia masih hidup maupun setelah wafat (Jama'ah, 15-10-2018). Dalam hal ini, sebagian dari pesannya yang masih dipegang kuat oleh jama'ah Tarekat Cukir adalah agar dalam pemilu selalu memilih PPP. Hingga detik ini, saat peneliti menulis disertasi, sebagian besar jama'ah masih bersimpati kepada PPP dan merupakan bagian dari pendukungnya, bukan karena PPP nya saat ini, tetapi karena pesan Kiai Adlan Aly pada saat masih hidupnya. Keterangan Kiai AA yang saat ini menjadi pengurus Tarekat Cukir untuk *idârah*

ghusniyah (setingkat kecamatan), yang mengutip pesan alm. Kiai Makki (mursyid dan politisi PPP) bahwa jika memang PPP itu rusak, maka tidak perlu menjauhi partinya. Tetapi justru kalau ingin membenahi, hendaknya malah mendekat dan memperbaikinya dari dalam (11-07-2018). Pesan historis dari dua tokoh itulah yang terus direproduksi, sehingga masih melekat dalam benak para jama'ah (*mindset*). Melalui keyaikinan bahwa tokoh pendiri turut serta hadir mengawai jalannya ketarekatan, dan keyakinan bahwa pesan-pesannya penting untuk dijalankannya, maka hal itu memberikan pengaruh kepada jama'ah tarekat untuk memilih PPP.

Pihak PPP sendiri menyatakan bahwa manfaat berelasi dengan Tarekat Cukir di antaranya adalah melanggengkan kesejarahan relasi bahwa Tarekat Cukir merupakan *partner* ruhiyah dengan PPP. selain itu, ada usaha dari pihak PPP untuk menempatkan ulama di atas dari kepengurusan yang eksekutif karena ulama dipandang sebagai warisan para Nabi (Gus JS: 07-07-2018). Barangkali hal ini ada benarnya. Tampak terlihat dalam lembaran SK kepengurusan DPW PPP Jawa Timur 2016-2021, utamanya persoanalia Majelis Syari'ah, diduduki oleh para Kiai mulai jabatan ketua hingga seluruh anggota. Begitu juga halnya untuk DPC PPP Kabupaten Jombang. Dengan demikian, tidak mengherankan manakala jama'ah Tarekat Cukir saat ini masih banyak yang masih mempertahankan pilihan politik mereka, yaitu PPP. Hubungan yang berkelanjutan sekian lamanya antara Tarekat Cukir dengan PPP, susah untuk memisahkan keduanya, meskipun saat ini muncul partai-partai baru yang secara masa depan lebih bagus dari PPP. Gus Fuad (15-10-2016), seorang jama'ah mengatakan:

“Sejak awal berdirinya, kaum tarekat di sini selalu mengarahkan pilihan politiknya ke PPP. Lalu, pada saat masa awal berdirinya PKB yang didirikan oleh Gus Dur, para jamaah sempat goyah, karena sebagian jama'ahnya menjatuhkan dukungan politiknya ke PKB. Itulah mengapa pada saat itu, PPP memiliki pesaing baru yang terbilang berat setelah Golkar”.

Bahkan pihak PPP memang berupaya melanggengkan ikatan sejarah tersebut, bahwa Tarekat Cukir sejak dulunya berelasi dengan PPP (Gus JS, 07-07-2018), tentunya selain itu juga ada kepentingan politik sebagaimana pengakuannya bahwa Gus JS, tidak bisa

menafikan peran yang besar kaum perempuan dalam mendulang suara untuk kepentingan politik elektoral.

Pertimbangan historis dalam memilih partai, setidaknya juga ditemukan dalam kasus di tempat lain. Penelitian Abdun Nasir (2006) membuktikan bahwa TQN di Lombok lebih dekat ke Golkar, karena tarekat yang secara genealogi murujuk ke Rejoso Jombang ini pusatnya juga berafiliasi ke Golkar.

6.1.1. Faktor Keyakinan Kebenaran Tidak Bolehnya Memilih Wanita Menjadi Pemimpin

Tarekat Cukir saat ini, tidak ingin menjadi generasi yang tidak patuh terhadap mursyid pendahulunya. Oleh karena itu, mereka tetap menjadi pendukung PPP. Mereka juga tidak mau menjadi generasi yang tidak patuh terhadap ajaran agamanya. Oleh karena itu, Tarekat Cukir tidak mendukung kandidat bupati wanita pada Pilbup Jombang 2018, meskipun itu kandidat yang diusung dari kader PPP. Dua hal tersebut telah menuntun Kiai Maftuh memainkan strateginya: tetap memilih PPP sebagai bentuk ketaatan kepada pesan para pendahulunya, dan menolak kandidat wanita sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agamanya. Dengan demikian, sebenarnya praktik tersebut dalam rangka tujuan yang sama, yaitu ketaatan.

Mundjidah, calon bupati dari kader PPP merupakan anak dari pendiri NU KH. Wahab Hasbullah dari Tambak Beras Jombang, dan pencalonannya diusung oleh PPP. Secara pribadi, ia memang telah aktif di IPPNU sejak remaja, juga Muslimat NU. Sebelum menjadi calon bupati, ia masih aktif di DPW PPP Jatim (SK. PPP 2016). Sebenarnya, secara modal simbolis dan sosial, Mundjidah memiliki pengaruh di kalangan warga NU. Namun, bagi Tarekat Cukir, secara teologis memilih pemimpin wanita tidak diperkenankan dalam ajaran agama. Kiai Maftuh (11-07-2018) mengutip dalil agama (peneliti disuruh mencari sendiri kelengkapannya) yang diyakininya sebagai kebenaran yang harus dijalankan, yaitu keumuman makna teks sebuah hadis riwayat al-Bukhari:

قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ »

Terjemahnya: *“Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan”*.

Dalil agama dijadikannya sebagai legitimasi praksis sosial berupa penolakannya terhadap kandidat bupati wanita tersebut. Tarekat Cukir melalui Kiai Maftuh tidak akan memilih calon pemimpin perempuan. Sebab, hal itu dipandang sebagai sebuah kebenaran pengetahuan agama dan melawannya berarti bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini kemudian diikuti oleh Kiai Ikhsan (07-02-2019) yang juga sekretaris Tarekat Cukir, bahwa ia menolak memilih calon pemimpin perempuan. Sayangnya, pengetahuan agama ini tidak dijadikan sikap resmi Tarekat Cukir yang berbentuk perintah untuk para jama'ah, sehingga memungkinkan sebagian jama'ah tidak mengikuti langkah ini. Apalagi, jama'ah Tarekat Cukir bukanlah semuanya dari kalangan awam, tetapi di dalamnya terdapat orang-orang pula yang mumpuni dalam penguasaan pengetahuan keagamaan.

Bagi Tarekat Cukir, persoalan Pilbup itu bukanlah persoalan memilih partai. Kondisinya sudah berbeda antara Orde Baru dengan pasca reformasi. Pilbup adalah tentang memilih figur pemimpin yang bukan milik partai lagi, tetapi ia sudah milik umum, karena ia dicalonkan oleh koalisi partai:

“...memilih bupati itu memilih figur, bukan memilih partai. Bupati itu bukan milik partai lagi, tetapi ia milik bersama. Kalau partai, kami tetap PPP...”. (Kiai Maftuh, 11-07-2018)

Memilih eksekutif dan legislatif adalah dua hal yang berbeda. Itulah mengapa, bagi Tarekat Cukir, PPP merupakan pilihan partai politiknya, sementara Mundjidah bukanlah pilihan kandidatnya. Meskipun penolakan ini berimplikasi pada terjadinya konflik antara Tarekat Cukir dengan PPP, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya.

Sebenarnya Kiai Maftuh sendiri tidak menolak pemimpin wanita, tetapi dengan catatan bahwa pihak yang dipimpinnya juga kaum wanita, seperti dalam kasus imamah dalam salat. Pada level tarekat, Kiai Maftuh (06-02-2019) tidak menampik adanya seorang mursyidah. Ia menyebutkan adanya mursyidah di kalangan Tarekat

Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah, yakni istri dari Kiai Muslih Abdurrahman Mranggen Demak. Tetapi wilayah kekuasaannya hanya terbatas pada wilayah perempuan di internal tarekat, dan tidak menjangkau pada wilayah kaum laki-laki. Oleh karena itu, tidak mengagetkan manakala dominasi laki-laki sedemikian kuat di kalangan kaum tarekat. Tarekat Cukir sendiri, dari awal berdirinya hingga saat ini, belum pernah ada terpilih seorang mursyidah. Hal ini berbanding lurus dengan hasil istikharah para Kiai untuk menentukan mursyid yang kelak memimpin Tarekat Cukir. Hanya saja, untuk tataran khalifah, Tarekat Cukir pernah mengangkat seorang perempuan yang diperuntukkan bagi kaum perempuan juga, dan dalam kondisi sangat diperlukan karena keterbatasan kaum laki-laki di lokasi setempat.

Temuan ini memperkuat temuan sebelumnya (Mulyadi, 2015: 159) bahwa wanita bisa tampil sebagai mursyidah, dengan catatan pembaiatan dibatasi dan berlaku hanya untuk kaum perempuan. Mulyadi mencatat, setidaknya ada empat mursyidah yang membaiat di *Naqsyabandiyah Muzhariyah* wilayah Madura, yaitu Nyai 'Aisyah, Nyai Thobibah, Nyai Syafi'ah, dan Nyai Syarifah Fathimah. Hanya saja, di Tarekat Cukir belum pernah ditemukan seorang mursyidah. Begitu juga dengan temuan Frede (2014) dalam artikelnya, ia menyebutkan tentang adanya pemimpin spiritual dari kalangan wanita. Di Mauritania terdapat tokoh wanita yang telah lama terlibat dan menjalani hidupnya sebagai mursyidah bagi Tarekat *Tijaniyah* dan sebagai pengajar bagi wanita lainnya. Mereka umumnya berasal dari keluarga kecil yang memang terpelajar dan memiliki pengaruh yang luas. Hanya saja, setelah kegiatannya, mereka tetap kembali ke bilik-bilik rumah mereka dan terisolir dari kehidupan sosial yang lebih luas. Situasi dan kondisi belakangan yang semakin terbuka, termasuk akses ruang belajar, telah menunjukkan peran wanita, baik dalam pemandu spiritual/mursyidah maupun pengajar keislaman. Mereka terlibat dalam pengajaran dan produksi pengetahuan Islam. Namun pada akhirnya, tetap saja partisipasi wanita dalam pengetahuan Islam dan otoritas merupakan tugas yang sulit.

Begitu juga, pada level internal Tarekat Cukir, peran wanita cenderung dibatasi, wanita memang dipandang sebagai kelas nomor

dua berdampak pada praktik sosial. Sementara laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang diutamakan daripada perempuan, dalam peran. Tampak tertulis dari nama-nama pengurus sebagaimana disebutkan pada bahasan sebelumnya, tidak ada satupun nama perempuan yang menjadi personil dalam kepengurusan. Wanita hanya akan dilibatkan pada acara-acara tertentu ketika dibutuhkan. Tradisi yang berlaku dan masih dipegang adalah adagium “*wong wadon iku opo jare wong lanang* (wanita itu adalah apa kata laki-laki)”. Jadi, posisi kaum wanita tergantung pada apa yang menjadi ketentuan kaum laki-laki (Kiai Ikhsan, 28-01-2019). Sebenarnya, tidak sedikit para pemuka agama yang berpandangan patriarkhis. Sebagaimana pendapat Kiai AM (10-2-2018) dari Mojokerto yang juga merupakan pengurus JATMAN, bahwa “*moso Kiai kon noto sandale wong wedok*”. Pandangan itu disampaikan terkait pemilihan gubernur Jawa Timur 2018, yang salah satu calonnya Khofifah Indar Parawansa. Hal serupa juga terjadi di kalangan Tarekat Cukir.

Tampaknya, di dalam kaum tarekat, posisi wanita cenderung dinomor duakan, meskipun tidak sampai pada “pembunuhan” terhadap perannya di lingkungan publik. Di Tarekat Cukir sendiri, wanita bisa menjadi agen bagi pembentukan berbagai majelis taklim. Tarekat Cukir juga tidak membatasi peran jama’ah wanita tarekat di ruang publik, seperti peran pendidikan di masyarakat, menjadi *khalifah* bagi jama’ah tarekat wanita lainnya. Hanya saja, yang tidak disepakati adalah ketika wanita menjadi pemimpin untuk laki-laki atau laki-laki dan perempuan. Temuan ini memperkuat temuan El-Haitami (2014), bahwa wanita di Maroko di era kontemporer ini memperoleh akses perannya ruang keagamaan dan partisipasi sosial. Selanjutnya, praktik dalam kerangka kesufian menjadi elemen penting bagi wanita untuk mengakses pengetahuan keagamaan dan mempunyai kontribusi terhadap pembangunan tradisi pendidikan, yang keduanya melihat wanita sebagai penyedia dan penerima instruksi. Aktifitas wanita dalam tradisi sufi telah tumbuh menjadi sebuah sisi penting bagi keagenan perempuan, sebuah konsep biasanya diasosiasikan dengan format yang lebih eksplisit dari resistensi terhadap struktur patriarki.

Di internal Tarekat Cukir, secara kualitas laki-laki cenderung mendominasi, tetapi secara kuantitas, jumlah jama’ah Tarekat Cukir

didominasi oleh kaum perempuan. Berdasarkan data resmi yang berhasil terdokumentasikan oleh sekretaris baru Tarekat Cukir, saat penelitian dilakukan, sejumlah 408 jama'ah. Dari jumlah tersebut laki-laki sebanyak 29% atau 117 jama'ah, sementara jumlah perempuan sebanyak 71% atau sebanyak 291 jama'ah.

Kentalnya budaya patriarkhis yang diperkuat dengan pemahaman keagamaan yang didasarkan pada QS: al-Nisa: 34 keutamaan laki-laki atas kaum perempuan, yang ditafsirkan dengan teks hadis riwayat al-Bukhari di atas. Sudah bisa ditebak, melalui proses pemahaman dan resepsi terhadap dalil agama dan kondisi lingkungan internal tarekat, kemudian diekspresikan ke arena yang lebih besar yaitu level pemerintah. Khofifah Indarparawansa yang menjadi kandidat Pilgub Jawa Timur tahun 2018, dan Mundjidah Wahab yang menjadi kandidat dalam Pilbup Jombang 2018 sama sekali bukan merupakan bidikan dukungan bagi Tarekat Cukir (Kiai Maftuh, 11-07-2018). Dalam hal ini, Kiai Maftuh (11-07-2018) tidak menyepakati adanya pemimpin wanita berdasarkan dalil agama. Penolakan Kiai Maftuh tersebut juga diikuti oleh Kiai Ikhsan, seorang yang menjabat sebagai sekretaris Tarekat Cukir, bahwa ia menolak memilih kandidat kepala daerah dari kalangan wanita (29-01-2019).

Jika wanita menjadi kepala daerah, maka konsekuensinya adalah orang-orang yang dipimpinnya tidak hanya kaum wanita, tetapi juga kaum lelaki; suatu hal yang tidak diinginkan Tarekat Cukir. Kiai Maftuh (06-02-2019) sendiri tidak mau disalahkan karena tidak menyepakati diusungnya kandidat tersebut. Kiai Maftuh hanya ingin menjalankan ajaran Islam, tentu sesuai dengan hasil resepsinya:

“...Saya jangan disalahkan kalau tidak milih Bu Mun. Karena itu tadi (perempuan)...”

Meskipun sebenarnya Kiai Maftuh sendiri merupakan pengurus tingkat cabang Jombang dan wilayah Jawa Timur:

“...Kami ini (pengurus) di PPP Cabang, dan pengurus PPP Wilayah...”. Ia melanjutkan perkataannya: “...Ketika Pilkada, kami tidak mendukung calon perempuan dan mendukung calon

laki-laki berdasarkan dalil. Tapi saya tetap PPP. Pilkada itu bukan memilih partai, tetapi memilih figur...”

Sayangnya, penolakan kandidat wanita tidak dijadikan sikap resmi Tarekat Cukir melalui maklumat terkait Pilbup Jombang 2018, sehingga memungkinkan sebagian jama'ah tidak mengikuti langkah ini. Salah seorang jama'ah yang peneliti temui mengatakan bahwa pilihan politik merupakan urusan pribadi. Apalagi, jama'ah Tarekat Cukir tidaklah semuanya terdiri dari kalangan awam, tetapi di dalamnya terdapat pula orang-orang yang mumpuni dalam penguasaan literatur keagamaan, terutama terkait tema kepemimpinan wanita yang masih *debatable*; yakni ada kelompok yang membolehkan dan ada kelompok yang tidak membolehkan.

Sebagaimana yang tampak di lapangan, bahwa tidak semua jama'ah Tarekat Cukir mengikuti pilihan Kiai Maftuh. Hal ini terkait erat perbedaan antara istilah mursyid dan guru mursyid yang dipertegas sendiri oleh Kiai Maftuh. Mursyid merupakan guru spiritual yang bersifat umum, sementara guru mursyid merupakan guru spiritual yang bersifat lebih khusus yang memiliki ikatan ruhani dengan murid melalui baiat. Misalnya, Kiai AA adalah jama'ah Tarekat Cukir sekaligus pengurus tarekat di tingkat kecamatan, tetapi ia tidak berbaiat di bawah kontrol Kiai Maftuh. Hubungan semacam ini berdampak pada soal kepatuhan yang tidak mengikat, utamanya terkait pilihan politik. Artinya, tidak perlu khawatir akan berdampak pada putusannya hubungan ruhani karena perbedaan pilihan politik. Kiai AA (11-07-2018) sendiri, lebih mendukung Mundjidah Wahab daripada kedua kandidat lainnya. Ketika peneliti bertanya tentang kandidat yang didukungnya, dan haruskah sama dengan pilihan petinggi Tarekat:

“...Oo nggih Bu Mun, lha lapo leren wes kecekel KPK kok jik dipilih niku lho. Opo maneh Bu Mun iku mandange putro Kiai Wahab. Figur-figurnya Kiai Wahab. Meskipun sementara gandengan e (Sum)rambah wong PDI, dan itupun ketika kenapa Bu Mun gandeng dengan PDI. Memang ada saran dari ulama' kharismatik. Jadi, Kiai Ali Masyhuri itu menyarankan. Hasil istikhorohe pokoe, sampean kudu gandeng abang (PDIP), sampean gandeng ijo (PKB) gak dadi...”

Terjemah: “...Oo ya Bu Mun, lha buat apa sudah jelas tertangkap KPK kok masih dipilih. Apalagi Bu Mun itu yang dipandang Kiai Wahab. Figur-figurnya Kiai Wahab. Meskipun sementara pasangannya adalah Sumrambah, orang PDI. Memang ada saran dari ulama’ kharismatik. Jadi, Kiai Ali Masyhuri itu yang menyarankan. Hasil istikharahnya, yang penting kamu harus menggandeng PDI, kamu menggandeng PKB tidak menang...”

Sumrambah merupakan orang dari kalangan abangan dan bernaung di PDIP. Sebenarnya, ia sendiri merupakan keponakan dari Kiai Maftuh yang justru mendukung Nyono Suharli. Kiai AA mendukung Mundjidah tidak semata karena posisi Nyono Suharli sedang berurusan dengan KPK. Tetapi karena melihat modal simbolik yang dimiliki Mundjidah, yaitu sosok figur ayahnya yang merupakan tokoh militan pendiri NU. Selain itu, dukungan Kiai Ali Masyhuri yang merupakan *backing* spiritual bagi pencalonan Mundjidah turut memperkuat Kiai AA mendukung Mundjidah.

Adanya perbedaan pilihan politik tersebut tidak menimbulkan gesekan yang berarti di internal Tarekat Cukir. Hanya saja, ketika mereka saling mengetahui pilihan cabupnya berbeda, muncul perasaan tidak enak (*ewuh-pakewuh*). Hanya sebatas itu. Mereka pun juga mengetahui bahwa kondisi saling “tidak enak” hanyalah musiman lima tahunan. Tetapi sebenarnya bagi mereka itu bukanlah hal yang utama. Karena mereka juga sama-sama mengetahui bahwa yang utama bagi mereka adalah keharmonisan tarekatnya (Kiai AA, 11-07-2018).

Dari uraian di atas, bisa dipahami bahwa penolakan kandidat wanita yang dilakukan oleh Tarekat Cukir merupakan bentuk kekerasan simbolik atau dilihat dari kaca mata gender disebut penindasan gender. Yang dimaksud penindasan gender adalah gambaran tentang situasi yang dihadapi perempuan sebagai konsekuensi dari hubungan kekuasaan langsung antara laki-laki dan perempuan, yang mana pihak laki-laki memiliki kepentingan fundamental dan konkret untuk mengontrol, memanfaatkan dan menindas perempuan, yaitu praktik dominasi. Dominasi di sini bisa diartikan sebagai segala macam hubungan di mana satu pihak, baik

individu maupun kolektif, pihak *dominan*, berhasil menjadikan pihak lain, baik individu maupun kolektif, pihak *subordinat*, sebagai instrumen keinginannya, dan menolak mengakui kemandirian pihak subordinat. Atau bisa sebaliknya, dari perspektif *subordinat*, ini adalah hubungan ketika signifikansi yang melekat pada pihak subordinat hanya dipandang sebagai instrumen keinginan pihak dominan (Ritzer & Goodman, 2014: 502).

Pola penindasan gender ini melekat pada cara pengaturan masyarakat yang terdalam dan penataan dasar dominasi yang umumnya disebut dengan patriarki. Patriarki bukanlah sesuatu yang tidak disengaja serta bukan konsekuensi sekuler sejumlah faktor lain, baik itu biologis atau sosialisasi ataupun peran seks atau sistem kelas. Patriarki adalah penataan kekuasaan primer yang dilestarikan oleh kehendak yang kuat dan cermat. Penindasan gender, perbedaan dan ketimpangan gender adalah produk yang menyertai patriarki (Ritzer & Goodman, 2014: 503). Pandangan tentang tidak bolehnya wanita tampil menjadi pemimpin, terutama dalam urusan politik merupakan produk ulama yang bias patriarkhis (Surwandono, 2017: 105-110), dan tentunya sesuai dengan pandangan penguasa ketika pandangan tersebut diproduksi. Kemudian produk tersebut direproduksi ulang secara terus menerus dan turun temurun hingga kini, termasuk apa yang terjadi di kalangan Tarekat Cukir saat ini.

Penolakan Tarekat Cukir terhadap kandidat bupati wanita menunjukkan bahwa adanya dialektika antara pemahaman terhadap produk hukum agama tentang tidak bolehnya wanita menjadi pemimpin dan terhadap kondisi lingkungan internal tarekat yang mengembangkan itu, dan kemudian hasil pemahaman tersebut diekspresikan di arena Pilbub Jombang 2018. Dengan kata lain, produk hukum agama dan pengalaman di lingkungan Tarekat Cukir turut memberikan pengaruh yang kuat terhadap penolakan kandidat bupati wanita. Temuan ini turut memperkuat teori yang dikembangkan Bourdieu (1990: 45, 55) bahwa praksis sosial merupakan hasil dialektika antara internalisasi ekterior dan eksternalisasi interior.

6.2. Faktor yang Mempengaruhi Tarekat Cukir Mengawal dan Mendukung Bupati sebagai Kandidat *Incumbent*

6.2.1. Keyakinan bahwa Pemimpin Harus dari Kalangan Laki-Laki dan Bukan Wanita

Penolakan Kiai Maftuh terhadap kandidat bupati wanita, selain diperkuat dengan pemahaman dalil agama di atas, juga diperkuatnya dengan mengutip ayat Alquran an-Nisâ': 34 tentang keutamaan laki-laki atas perempuan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ...

Itulah mengapa, bagi Kiai Maftuh, kepala daerah haruslah dari kalangan laki-laki. Pandangan Kiai Maftuh seperti ini jika ditelusuri, maka sebenarnya merupakan pengaruh dari pemahamannya terhadap tafsir atas teks tersebut. Jejak reproduksi fikih ayat tersebut di atas dapat ditelusuri di dalam kitab-kitab klasik, di mana Kiai Maftuh cenderung menguasainya sebagai modal budayanya. Misalnya, Ibnu Katsir, mengomentari ayat tersebut bahwa laki-laki merupakan pelurus bagi wanita ketika “bengkok”, yakni laki-laki sebagai pemimpinnya, hakimnya dan pendidiknya. Laki-laki lebih utama dan lebih baik daripada perempuan, buktinya kenabian secara khusus diangkat dari kalangan laki-laki, begitu juga dalam hal kepemimpinan negara (Ibnu Katsir: II, Tema 34: 292).

Dominasi laki-laki juga telah mentradisi di kalangan internal Tarekat Cukir, utamanya dalam urusan kemursyidan dan kepengurusan. Tampaknya, internalisasi pemahaman ajaran teks keagamaan, dan kondisi lingkungan internal Tarekat Cukir mempengaruhi keputusan mereka untuk mendukung kandidat bupati laki-laki. Beberapa jama'ah tarekat yang peneliti temui (15-10-2018) juga mengakui bahwa mereka lebih memilih pemimpin dari kalangan laki-laki. Mereka tidak mempedulikan tentang menang-kalah, yang terpenting bagi mereka adalah memilih calon pemimpin dari kalangan laki-laki karena niat taat kepada Allah SWT sebagai bagian dari ibadah berdasar dalil yang menuntun mereka. Pandangan patriarkis seperti ini terus direproduksi di kalangan mereka, sehingga menjadi sebuah ideologi yang mendasari pilihan politik mereka. Kiai Maftuh (11-07-2018) mempertegas bahwa jika

ternyata yang menang bukanlah yang mereka dukung pada saat pemilihan, maka hal itu nantinya tetap akan mereka dukung pada saat selanjutnya.

Untuk memperkuat pandangannya, Kiai Maftuh (11-07-2018) mencitrakan tokoh kandidat laki-laki yang didukungnya dengan citra yang positif. Citra positif itu ia ambilnya dari pemahamannya terhadap ayat Alquran, dan kemudian karakteristik yang ada dalam ayat tersebut dilekatkan pada kandidat yang dikawal dan didukungnya. Penggalan yang dimaksud Kiai Maftuh adalah terletak pada kata “*qawiyyul amin*” pada QS: Qasas: 26, yang terjemahannya sebagai berikut:

“Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) atau menjadi pemimpin adalah orang yang kuat lagi amanah”.

Bagi Kiai Maftuh, ayat di atas terkait dengan karakteristik seseorang yang layak menjadi pemimpin, yaitu kuat dan amanah. Secara interpretatif, kata kuat bisa dimaknai sebagai kuat secara fisik, ekonomi, mental, akhlak dan spriritualitasnya, iman, ilmu dan mampu mengaplikasikannya. Semua itu merupakan modal bagi calon seorang pemimpin dalam berelasi dengan pihak lain, baik dengan pesaingnya maupun dengan masyarakatnya nanti setelah menjadi pemimpin. Tetapi berbagai modal tersebut belumlah cukup untuk dijadikan senjata dalam kontestasi Pilbup Jombang 2018. Oleh karena itu, berbagai modal tersebut harus disatukan dengan karakteristik amanah, yakni sifat yang dapat dipercaya dan memiliki integritas tinggi. Idealnya, kedua karakteristik tersebut berada dalam diri seorang pemimpin. Sehingga dengan demikian, bisa diharapkan nantinya pemimpin tersebut mampu membawa wilayahnya ke arah yang lebih baik dari kondisi sebelumnya di berbagai lini kehidupan.

Kiai Maftuh telah mengenal begitu dekat dengan Nyono sejak jauh sebelum menjadi bupati, karena hubungan guru-murid. Karakteristik tentang kepemimpinan yang diperolehnya melalui pemahamannya terhadap ajaran agama kemudian direproduksinya, dilihatnya terdapat dalam pribadi Nyono, dibanding kedua kandidat lainnya. Hal tersebut kemudian diwacanakan di internal kelompok Tarekat sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaannya,

memperoleh posisi dominan dalam pertarungannya dengan pihak yang menjadi rivalnya. Melalui acara “senenan”, “sewelasan” maupun “haul” (17-05-2017) dengan menghadirkan Nyono sebagai bagian dari arena pertunjukan bahwa Kiai Maftuh mendukungnya maju sebagai kandidat bupati Jombang 2018. Bagi Kiai Maftuh, cukuplah mengundang tokoh yang didukungnya duduk atau hadir di sampingnya, sebagai pertanda sebuah dukungan, dan hal itu telah dipahami oleh jama’ah tarekat. Apalagi tokoh tersebut diberi kesempatan menyampaikan sambutan dalam acara itu. Tampaknya melalui arena acara-acara tersebut, Kiai Maftuh telah berusaha mengontrol keyakinan jama’ah Tarekat Cukir bahwa Nyono tersebut adalah tokoh yang layak untuk didukung maju sebagai kandidat *incumbent*.

Namun demikian, upaya menghegemoni alam pikiran jama’ah tarekat agar memilih Nyono tidak didukung kuat oleh habitus Nyono sendiri. Nyono, yang dicitrakan sebagai orang yang kuat dan amanah, justru di kemudian hari menghadapi masalah tindak pidana korupsi. Citra baik yang dibangun untuk figur Nyono menjadi merosot tajam. Upaya Kiai Maftuh membangun citra dan kepercayaan di kalangan jama’ah Tarekat Cukir untuk mendukung Nyono, seakan runtuh dalam semalam dengan adanya kasus tersebut. Padahal Kiai Maftuh, sejak sebelum Nyono menjadi kandidat Bupati Jombang 2018, telah berusaha mengontrol jama’ah Tarekat Cukir agar nantinya dukungan diarahkan ke kandidat Nyono, baik melalui acara “senenan”, “sewelasan” maupun “haul” dengan menghidirkannya sebagai pembicara. Itulah mengapa, jama’ah Tarekat Cukir seperti Kiai AA misalnya, cenderung mendukung Mundjidah dalam Pilbup Jombang 2018, sebagaimana yang telah peneliti jelaskan sebelumnya.

Kiai Maftuh (10-02-2019) pernah mengungkapkan tentang angka kemenangan Mundjidah yang terbilang tipis, dan ia mengandaikan jika saja Nyono tidak sedang menghadapi masalah dengan KPK, maka ia berani memastikan kemenangan kandidat yang didukungnya tersebut:

“...umpami mboten kenging kasus, bisa dipastikan P. Nyono menang. Niku menange Mundjidah menang tipis kok...” Terj:

“...seandainya tidak kena kasus, bisa dipastikan P. Nyono menang. Itu menangnya Mundjidah tipis kok...”.

Kemenangan tipis Mundjidah juga diungkapkan Kiai LB yang menjadi Jurkamnya (08-07-2018):

“...saya agak kecewa juga, Bu Mun hanya menang tipis”

Kiai Maftuh (10-02-2019) menambahkan bahwa beredarnya berita tentang tertangkapnya Nyono oleh KPK tersebut, telah membuat para pendukungnya banyak yang mencabut diri dari dukungan, atau golput. Namun demikian, Kiai Maftuh dan beberapa elit Tarekat Cukir, di antaranya Kiai Ikhsan (07-02-2019) tetap percaya bahwa Nyono tidak bersalah, sehingga dalam pencalonannya layak untuk tetap didukung. Baginya, menang dan kalah urusan lain yang tidak terkait dengan ketaatan terhadap ajaran agama.

Dengan tertangkapnya Nyono tersebut, Gus JS (07-07-2018) membuktikan bahwa penolakan terhadap kandidat Mundjidah karena alasan kewanitaannya terbukti memiliki kelemahan. Logikanya, seandainya Kiai Maftuh memang tidak setuju dengan kepemimpinan wanita, maka seharusnya ia menolaknya sejak jauh sebelumnya. Sebab, seandainya bupati Nyono Suharli yang tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK seperti yang dialami saat ini, tentu yang naik menggantikan bupati nantinya adalah wakilnya, yaitu Mundjidah. Dan nyata, hal itu benar adanya saat ini:

“Kalau alasan perempuan, kenapa sejak awal, tahun 2013 ia mendukung. Realitasnya yang punya massa riil itu Bu Mun. Secara logika hukum, jika bupati berhalangan lama (misalnya menghadapi kasus tindak pidana), maka yang naik pasti wakil bupati yang perempuan itu. Itu kan hanya retorika belaka”.

Dari uraian di atas, bisa dipahami bahwa yang mempengaruhi Tarekat Cukir mendukung Nyono adalah 1) pemahaman terhadap ajaran agama tentang keutamaan laki-laki atas perempuan dalam hal kepemimpinan, 2) pemahamannya terhadap ajaran agama tentang karakteristik pemimpin adalah laki-laki yang kuat dan amanah. Namun demikian, faktor ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada faktor lain yang mendukungnya, sebagaimana di bawah ini.

6.2.2. Bantuan Ekonomi

Sebagaimana di sebutkan di atas, bahwa penolakan Kiai Maftuh terhadap salah satu kandidat bupati karena kewanitaannya, tetapi ternyata terdapat kelemahan, yaitu seharusnya sejak awal pencalonan Nyono yang berpasangan dengan Mundjidah tahun 2013, Kiai Maftuh tidak perlu mendukungnya. Sebab secara logika, jika bupati berhalangan yang naik menjadi bupati pasti wakilnya yang wanita itu. Bisa saja, Kiai Maftuh mendukung kandidat laki-laki yang berpasangan dengan laki-laki yang ada saat itu.

Itulah mengapa, Gus JS (07-07-2018) meyakini bahwa penolakan Kiai Maftuh terhadap Mundjidah sebenarnya bukan karena faktor kewanitaannya, tetapi ada pemicu lain yang mendukungnya. Hafidh Ma'shoem (09-02-2018) juga berpandangan bahwa tidak mendukungnya Kiai Maftuh terhadap Mundjidah lebih disebabkan karena adanya "*paweweh*" atau pemberian yang diterimanya dari kandidat *incumbent*. Kiai Maftuh sendiri (10-02-2019) menjelaskan bahwa secara kontribusi, Mundjidah tidak pernah memberikan kontribusinya sedikitpun terhadap kelompok Tarekat Cukir. Peneliti mencurigai adanya keterkaitan antara penolakan Kiai Maftuh terhadap Mundjidah dengan tidak adanya kontribusi Mundjidah dan organisasi PPP yang mengusungnya terhadap Tarekat Cukir. Sebab, Kiai Maftuh (11-07-2018) sendiri menjelaskan bahwa kelompok Tarekat Cukir belum pernah mendapat kontribusi berarti dari organisasi PPP. Hal ini diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Hafidh Ma'shoem (09-02-2018) bahwa PPP memang tidak pernah memberikan bantuan materi kepada kelompok Tarekat Cukir.

Jika memang demikian adanya, maka tidak mendukungnya Kiai Maftuh terhadap Mundjidah juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Apalagi di saat yang sama, Kiai Maftuh mendukung Kandidat Nyono yang jauh sebelumnya sudah memberikan kontribusi kepada Kiai Maftuh secara pribadi dan secara lembaga ketarekatan. Sebagaimana juga dalam proses pendirian Yayasan Tarekat Cukir yang ditujukan untuk mencari dana. Proses legalisasi organisasi Tarekat Cukir dengan membentuknya sebagai sebuah yayasan, itu tujuannya untuk mencari sumber pendanaan; baik ke kabupaten

maupun ke propinsi. Karena salah satu syarat untuk mendapat sumber pendanaan dari pemerintah itu harus berupa lembaga yang formal, dan sudah memiliki badan hukum (Gus JS, 07-07-2018). Tetapi pandangan ini ditolak oleh Kiai Maftuh (11-07-2018), bahwa upaya legalisasi Tarekat Cukir di bawah Kemenkumham ditujukan untuk mengamankan organisasi dan seluruh kegiatannya, di tengah maraknya tuduhan kaum Wahabi terhadap orang-orang NU sebagai ahli bid'ah dan kaum tarekat sebagai penista agama. Dengan dimilikinya SK dari Kemenkumham, maka segala kegiatan ritualnya, legal dilaksanakan di seluruh di wilayah Indonesia. Alasan Kiai Maftuh ini cukup dimaklumi, mengingat bahwa secara historis bergabungnya kaum tarekat di bawah NU, di antaranya untuk mencari perlindungan dari tuduhan takhayul, bid'ah, khurafat (Shodiq, 2008). Tetapi bisa jadi, keduanya sama-sama benarnya berdasarkan praktik-praktik yang ada.

Kiai Maftuh sendiri tidak begitu menghiraukan berbagai tuduhan dari pihak rivalnya, yang ada sangkut pautnya dengan motivasi “dana/ materi”. Meskipun sebenarnya, masalah “harta benda” bagi kaum tarekat masih dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai suatu hal yang masih tabu dan jauh dari zuhud. Namun demikian, bukan tidak mungkin pada suatu waktu, kaum tarekat bergerak untuk memperoleh legalitas dan dana untuk menghidupkan kegiatan kelompoknya, apalagi sudah berbentuk organisasi dengan susunan kepengurusan, sebagaimana organisasi lainnya. Dalam hal ini, Gus JS (07-07-2018) menceritakan pengalamannya pada masa-masa sebelumnya, yakni ketika Gus JS dan PPP turut serta mensukseskan pencalonan pasangan kandidat bupati Nyono Suharli (Golkar) dan calon wakil bupati Mundjidah (PPP) periode sebelumnya. Akhirnya, pada tahun 2013 mereka berdua terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jombang hingga tahun 2018. Pasca itu, Kiai Maftuh yang juga merangkap sebagai salah satu pengurus PPP ikut menikmati “hasil” melalui kelembagaan tarekat itu. Gus JS (07-07-2018) menjelaskan bahwa pada tahun 2016 muncul regulasi baru bahwa yang bisa mengakses pendanaan di APBD dan APBN, bahwa sebuah lembaga harus berbentuk yayasan, atau harus memiliki legitimasi dari Kemenkumham. Dengan demikian, nantinya Tarekat Cukir tidak hanya diakui secara *de facto*, tetapi juga secara *de jure*.

Jadi, sebenarnya penolakan Kiai Maftuh terhadap Mundjidah, lebih dipengaruhi beban hutang budi terhadap Nyono karena telah banyak membantu materi:

“Kiai Maftuh tidak mau mendukung (Mundjidah), sebab ia sudah terlanjur punya hutang budi terhadap Pak Nyono”. (Gus JS, 07-07-2018)

Berbagai bantuan yang diterima Kiai Maftuh sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan Tarekat Cukir turut memperkuat dugaan bahwa dukungan Kiai Maftuh terhadap Nyono dipengaruhi faktor ekonomi. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Nyono juga membutuhkan dukungan moral dan sosial dari Tarekat Cukir pada Pilbub Jombang 2018. Arinya, kedua belah pihak menjalankan proses pertukaran modal yang dimiliki masing-masing pihak.

Dari uraian di atas bisa ditemukan salah satu faktor yang turut mempengaruhi Tarekat Cukir mendukung Nyono, yaitu faktor kepentingan ekonomi untuk kelancaran dalam menjalankan program-program yang dijalankan Tarekat Cukir.

Temuan ini juga ditemukan pada kasus di tempat lain, misalnya kajian Sadri (2015) bahwa kaum Tarekat Sathariyah di Sumatera Barat terlibat aktif mendukung salah satu kandidat Gubernur pada tahun 2010, dengan harapan kandidat nantinya akan mempertahankan kepentingan Tarekat Syathariyah, tentunya dengan catatan kandidat yang didukungnya memperoleh kemenangan. Dalam hal ini, kepentingan yang dimaksud adalah berupa pembinaan dan perlindungan agar ada rasa nyaman saat menjalankan ibadah terhadap kaum Tarekat, pemberian bantuan untuk surau dan pesantren tradisional ketarekatan Syathariyah, dan hubungan silaturahmi yang berkelanjutan. Hanya saja, pada kasus Tarekat Cukir, tidak harapan memperoleh perlindungan dari pihak bupati. Sebab, Tarekat Cukir secara kelembagaan sudah memiliki ijin dari Kemenkumham. Jadi, dalam pelaksanaan ibadah tidak ditemukan kekhawatiran adanya ancaman dalam menjalankan ritual.

Sementara itu, pertimbangan kepentingan pribadi juga ditemukan dalam kasus dukungan Kiai Maftuh terhadap Nyono. Hal

ini tampak pada sumbangan Nyono berupa kemudahan yang didapatkan Kiai Maftuh dalam memperoleh bantuan aspal jalan beberapa meter menuju lokasi Pondok Pesantren yang dipimpin Kiai Maftuh. Dasar pertimbangan seperti ini juga ditemukan dalam kasus Pilgub di Sumatera di atas. Tarekat Syathariyah mendukung salah satu kandidat gubernur didasari kepentingan pribadi berupa materi. Meskipun pandangan Sadri masih berupa dugaan yang lumrah terjadi dalam politik dukung-mendukung kandidat, apalagi kondisi perekonomian pimpinan Tarekat tidak begitu mendukung. Selain itu, kesimpulan Sadri tersebut didasarkan pada kebiasaan pimpinan Tarekat dan kalangan pesantren yang dipimpinnya cenderung senang diberi, bukan memberi.

Penelitian Arsyad dan Syam (2014: 49) menemukan bahwa dukungan elit Tarekat Qadiriyyah terhadap kandidat Kalma Katta sebagai bupati Majene 2011, didasari dua pertimbangan yang salah satunya karena faktor performa kandidat yang mendukung pengembangan dakwah Tarekat Qadiriyyah di Majene. Rekam jejak Kalma Katta menunjukkan banyak memberikan bantuan moril dan materiil bagi keberlangsungan perkembangan kelompok Tarekat Qadiriyyah Majene sejak menjadi wakil bupati tahun 2001. Temuan Arsyad dan Syam pada faktor ini menunjukkan adanya kesamaan dengan apa yang terjadi di Tarekat Cukir.

6.2.3. Kedekatan Interpersonal/ Emosional

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa relasi antara Kiai Maftuh yang juga mursyid Tarekat Cukir dengan Nyono sebagai Bupati Jombang sebenarnya memiliki akar ikatan kedekatan emosional, yaitu ikatan guru spiritual dan murid yang sudah terjalin dengan baik sejak jauh sebelumnya; sejak Nyono belum menjadi bupati Jombang. Dalam hal ini, Kiai Maftuh sebagai guru spiritual dan Nyono sebagai murid, meskipun bukan hubungan murid-guru mursyid. Kemudian, relasi keduanya membentuk relasi yang saling menguntungkan (simbiosis mutualism). Temuan penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian Setyawati (2017: 85-164) menemukan faktor kedekatan interpersonal antara guru tarekat dengan kandidat dalam kasus Pilbup Rokan Hulu 2011. Kedekatan guru Tarekat Naqsyabandiyah

di Sontang dengan kandidat merupakan salah satu syarat penting. Sebab, faktor kedekatan yang baik dipandang mampu menjamin adanya komunikasi yang baik antara dirinya dan pihak aktor politik. Kedekatan interpersonal tersebut harus dijaga agar pihak tarekat tidak hanya dimanfaatkan sekedar untuk kepentingan politik elektoral pihak aktor politik. Hanya saja, hubungan antara pihak Tarekat *Naqsyabandiyah* dengan kandidat pada temuan Setyawati sebatas kedekatan dalam berkomunikasi ketika kunjungan dan dipandang sebagai bentuk restu, bukan kedekatan dalam kerangka kekerabatan atau hubungan guru mursyid dengan murid.

Penelitian Arsyad dan Syam (2014: 49) menemukan bahwa dukungan elit Tarekat Qadiriyyah terhadap kandidat Kalma Katta sebagai bupati Majene 2011, didasari dua pertimbangan yang salah satunya karena faktor kedekatan interpersonal, yakni kekerabatan. Istri pimpinan Tarekat Qadiriyyah, H. Ilham Shaleh dan istri kandidat bupati Kalma Katta adalah sepupu sekali (Jawa: misanan). Lebih dari itu, adik kandung dari H. Ilham Shaleh merupakan istri dari adik kandung Kalma Katta yang menjadi faktor pendukung eratnya ikatan kekerabatan. Arsyad dan Syam memandang bahwa kedekatan interpersonal menjadi salah satu faktor penting karena hal tersebut bisa menjadi jaminan agar aktor politik di kemudian hari tidak meninggalkan basis pendukungnya saat telah terpilih. Sebaliknya, Tarekat Qadiriyyah menjalankan fungsi kontrolnya terhadap aktor politik sebagai konsekuensi dukungan politik. Faktor kedekatan emosional berupa pertalian kekerabatan seperti temuan Arsyad dan Syam tidak ditemukan dalam penelitian ini.

Penelitian Sadri (2015) juga menemukan bahwa dasar pertimbangan Tarekat Syathariyyah mendukung salah satu kandidat Gubernur Sumatera Barat karena adanya hubungan emosional kedekatan yang sudah terjalin sejak lama dengan wakil kandidat, bahkan pertimbangan ini merupakan faktor dominan. Kedekatan antara pihak Tarekat dengan wakil kandidat, yakni Muslim Kasim terjalin dengan baik sejak ia menjadi bupati Padang Pariaman selama dua periode.

6.2.4. Performa/ Kualitas dan Program Kandidat

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Kiai Maftuh mendukung kandidat Nyono juga atas dasar pertimbangan figurinya:

“...memilih bupati itu memilih figur, bukan memilih partai. Bupati itu bukan milik partai lagi, tetapi ia milik bersama. Kalau partai, kami tetap PPP...” (Kiai Maftuh, 11-07-2018)

Kiai Maftuh (11-07-2018) mempertegas bahwa dukungannya kepada Nyono bukan karena dasar pertimbangan partai Golkar yang mengusungnya, tetapi lebih karena figurinya, dan kepribadiannya. Karena Nyono memiliki karakter dan kepribadian yang egaliter, rendah hati, dermawan dan mau mendekati dengan para ulama, khususnya dengan kelompok Tarekat Cukir. Artinya, bupati sebelum Nyono dianggap tidak mau mendekati dengan para ulama.

Dasar pertimbangan seperti ini juga terjadi pada kasus di tempat lain. Misalnya, penelitian sadri (2015) menyebutkan bahwa dasar pertimbangan Tarekat Syathariyah mendukung salah satu kandidat gubernur, karena pasangan calon tersebut dipandang memiliki perhatian khusus terhadap upaya peningkatan iman dan takwa kepada Allah SWT, peduli terhadap kesejahteraan ulama, dan masyarakat Sumatera Barat, misalnya peningkatan usaha pertanian, menanggulangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Dukungan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kandidat memiliki kemampuan yang telah teruji sebagai pemimpin rakyat.

Penelitian Setyawati (2017: 85-164) menemukan bahwa Tarekat *Naqsyabandiyah* di Kabupaten Rokan Hulu mendukung kandidat bupati Rokan Hulu 2011 didasarkan atas pertimbangan performa kandidat yang dinilainya baik dalam mendukung keberlangsungan dakwah kaum Tarekat Naqsyabandiyah. Hanya saja, temuan Setyawati menyebutkan bahwa dukungan petinggi tarekat terhadap kandidat disertai dengan arahan dari si mursyid terhadap jama'ahnya. Hal ini berbeda dengan kasus di Tarekat Cukir yang tidak disertai dengan arahan dari mursyid terhadap jama'ahnya untuk mendukung kandidat tertentu.

6.3. Simpulan

Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi terbentuknya praksis sosial dualisme pilihan politik Tarekat Cukir adalah sebagai berikut:

Pertama, Tarekat Cukir mendukung dan memilih PPP, tetapi menolak kandidat bupati yang diusung oleh partai tersebut, dipengaruhi oleh keyakinan dan kebenaran sumber dan nilai ajaran menjaga ikatan ruhani antara murid dengan guru mursyid melalui kepatuhan terhadap guru mursyid dalam urusan ketarekatan dan pilihan politik. Ini merupakan faktor dominan yang mempengaruhi, yang didukung oleh faktor-faktor lainnya, yaitu 1) adanya persamaan kecenderungan ideologi dan tradisi yang berkembang di kalangan PPP dan Tarekat Cukir, yang mana keduanya memiliki akar rumput yang cenderung sama, yaitu warga NU; 2) adanya keinginan berkelanjutan dari pihak Tarekat Cukir agar ajaran ketarekatan; 3) adanya fakta historis yang membuat kedua belah pihak merasa terikat dan merasa perlu melanggengkan ikatan tersebut. Selain itu, pengaruh kepentingan politik PPP juga turut memperkuat faktor ini; 4) di sisi lain, Tarekat Cukir menolak kandidat bupati Jombang yang diusung PPP pada Pilbup 2018 karena adanya keyakinan kebenaran ajaran agama bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Faktor ini menjadi titik pisah antara Tarekat Cukir dengan PPP.

Kedua, Tarekat Cukir mendukung Nyono sebagai kandidat *incumbent* bupati Jombang pada Pilbup 2018 dipengaruhi oleh keyakinan kebenaran ajaran agama bahwa pemimpin/ kepala daerah harus dari kalangan laki-laki, dan bukan wanita. Faktor ini merupakan faktor dominan, yang didukung kuat dengan 1) adanya pemberian Nyono dan penerimaan Tarekat Cukir bantuan ekonomi; 2) adanya kedekatan Interpersonal/ Emosional, yang dalam hal ini terhdapat hubungan guru-murid antara pihak badal mursyid Tarekat Cukir dengan pihak kandidat, yaitu Kiai Maftuh sebagai guru spiritual dan Nyono sebagai kandidat bupati; 3) penilaian terhadap performa/ kualitas dan program kandidat yang dipandang pro rakyat.